

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini masih menjadi isu yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi menjadi persoalan global yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Perempuan dan anak seringkali berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun tindak kriminal. Kekerasan tersebut dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan mulai dari lingkungan kerja, ruang publik, lembaga pendidikan, hingga di dalam keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi. Tercatat sebanyak 31.948 kasus, dengan jumlah korban laki-laki 6.894 dan korban perempuan mencapai 27.659 pada tahun 2024. Dari total kasus tersebut, kekerasan seksual menjadi jenis yang paling banyak dengan jumlah 14.460 kasus, kekerasan fisik 11.372 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 9.800 kasus. Pada tahun 2025 angka kekerasan kembali meningkat menjadi 35.131 kasus terdiri dari 30.013 korban perempuan dan 7.017 korban laki-laki. Bentuk kekerasan yang terjadi relatif serupa, dengan jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 15.305 kasus, kekerasan fisik 12.160 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 11.184 kasus.

Meningkatnya angka kekerasan menunjukkan bahwa permasalahan ini merupakan isu sosial yang mendesak dan harus segera ditangani secara serius. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para korban melalui kebijakan serta layanan yang efektif. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) di setiap daerah, sebagai sarana untuk memberikan pelayanan langsung dan memastikan korban memperoleh perlindungan yang dibutuhkan. Pembentukan lembaga ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4

Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu.

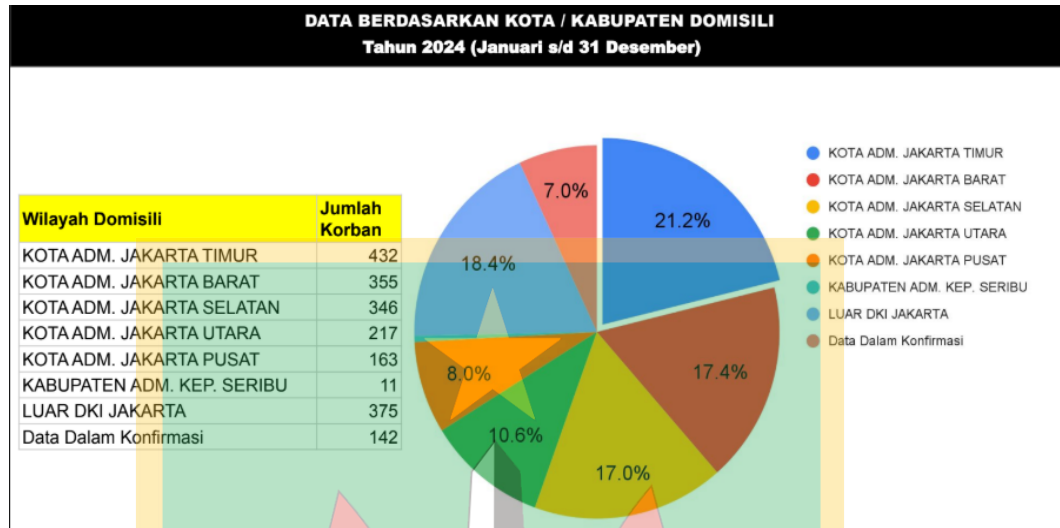
Meskipun UPT PPPA telah berupaya menangani berbagai kasus kekerasan, namun, fakta menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terjadi masih belum mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa upaya penanganan yang telah dilaksanakan masih perlu ditinjau lebih lanjut, khususnya pada aspek efektivitas layanan. Selain faktor internal dalam proses penanganan, efektivitas UPT PPPA juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus kekerasan.

Di lingkungan masyarakat, kasus kekerasan terhadap anak kerap kali dipandang sebagai hal yang memalukan bagi keluarga dan harus ditutupi, bukan sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti (Kukuh, 2022). Pandangan tersebut menyebabkan banyak korban tidak melaporkan kejadian yang dialami, sehingga tidak memperoleh pendampingan yang layak baik secara hukum maupun psikologis. Kondisi menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih berada dalam posisi rentan terhadap segala bentuk kekerasan.

Selain itu, tantangan lain datang dari faktor sosial dan geografis di wilayah padat penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk Jakarta Timur mencapai 3.085.058 jiwa menjadikannya wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di antara lima kota administratif di Jakarta. Kepadatan dan dinamika sosial ini berdampak pada tingginya kerentanan terhadap terjadinya kekerasan.

Berdasarkan data kasus kekerasan di Provinsi Jakarta, sejak tahun 2024-2025 Jakarta Timur menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan lima kota/kabupaten lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Jakarta Timur bukan sekadar kejadian yang hanya terjadi sesekali, melainkan sudah menjadi masalah sosial yang berlangsung terus-menerus dan perlu mendapat perhatian yang serius. Tingginya angka kekerasan tidak hanya mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap anak di wilayah tersebut, tetapi juga menjadi tanda

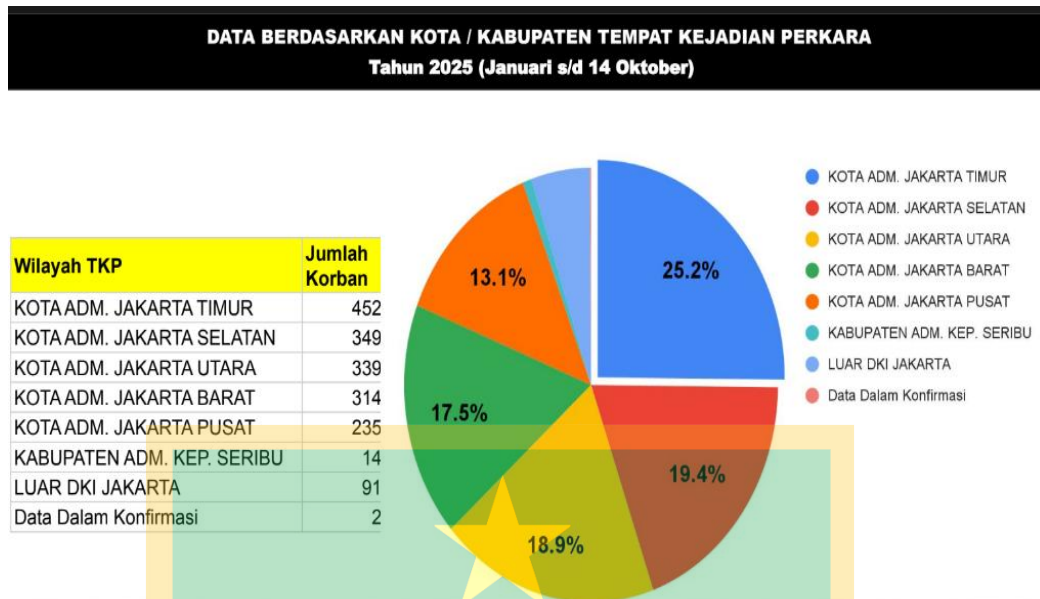
bahwa sistem layanan yang tersedia masih menghadapi kendala dalam menjangkau dan menangani setiap kasus secara optimal.



Gambar 1.1 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Kota/Kabupaten Domisili

Sumber: UPT PPPA (2024)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Jakarta Timur menempati posisi teratas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibandingkan dengan lima kota administratif lainnya yakni sebanyak 432 kasus. Angka ini menegaskan bahwa Jakarta Timur menjadi lokasi dengan tingkat kekerasan tertinggi disusul posisi kedua adalah Jakarta Barat dengan 355 kasus, Jakarta Selatan di urutan ketiga dengan 346 kasus, Jakarta Utara 217 kasus, dan Jakarta Pusat sebanyak 163 kasus. Adapun kabupaten Administratif Kepulauan Seribu melaporkan 11 kasus, sedangkan korban berdomisili di luar di wilayah Jakarta mencapai 375 kasus, serta terdapat 142 kasus yang masih dalam proses konfirmasi.



Gambar 1.2 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian Perkara

Sumber: UPT PPPA (2025)

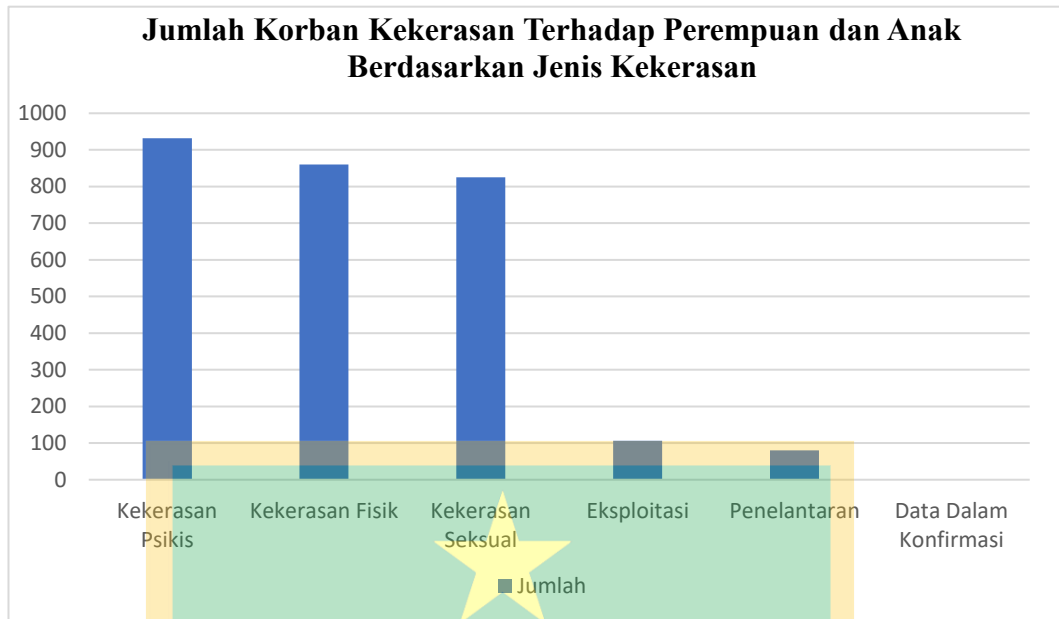
Tren tersebut berlanjut hingga tahun 2025, di mana Jakarta Timur kembali mencatat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data hingga 14 Oktober 2025, tercatat sebanyak 452 korban berasal dari wilayah Kota Administratif Jakarta Timur, menjadikannya sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi dengan persentase 25,2% dari total kasus yang tercatat. Posisi berikutnya ditempati oleh Jakarta Selatan dengan 349 korban (19,4%), disusul Jakarta Utara sebanyak 339 korban (18,9%), serta Jakarta Barat dengan 314 korban (17,5%). Sementara itu, Jakarta Pusat mencatat 235 korban (13,1%), dan wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu hanya 14 korban, dengan beberapa kasus lainnya terjadi di luar wilayah Jakarta.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan di Kota Administratif Jakarta Timur Tahun 2024

Sumber: UPT PPPA (2024) diolah Peneliti

Kecamatan	Jumlah Kasus
Tidak Diketahui	10
Matraman	40
Pulogadung	46
Jatinegara	62
Kramat Jati	40
Pasar Rebo	47
Cakung	86
Duren Sawit	65
Makasar	25
Ciracas	32
Cipayung	64

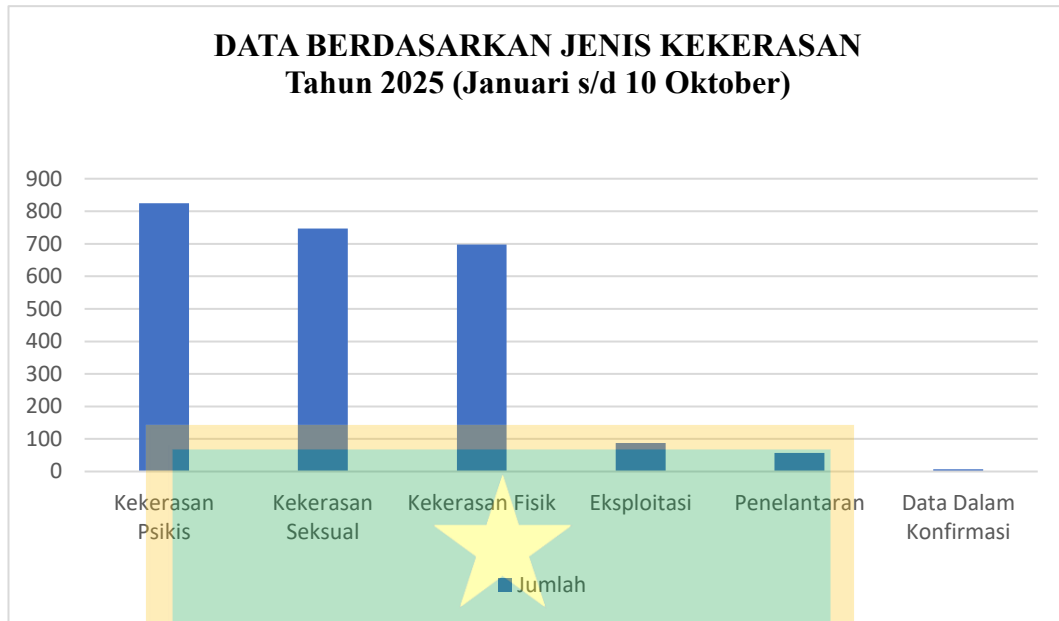
Jika ditinjau berdasarkan sebaran kasus di tingkat kecamatan, Kecamatan Cakung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Jakarta Timur, dengan tercatat berjumlah 86 kasus sepanjang tahun 2024. Angka tersebut jauh melampaui kecamatan lainnya seperti Jatinegara sebanyak 62 kasus, Duren Sawit 65 kasus, dan Pasar Rebo 47 kasus. Adapun kecamatan dengan jumlah kasus terendah antara lain Makasar sebanyak 25 kasus dan Ciracas sebanyak 32 kasus.



Gambar 1.3 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

Sumber: UPT PPPA (2024) diolah Peneliti

Jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan, data sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan psikis menempati posisi terbanyak. Dari keseluruhan kasus, sebanyak 932 kasus atau sekitar (33,2%). Selanjutnya diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 860 kasus (30,7%), dan kekerasan seksual sebanyak 825 kasus (29,4%). Terdapat pula 106 kasus eksploitasi (3,8%), 80 kasus penelantaran (2,9%), serta kasus yang masih dalam proses konfirmasi.



Gambar 1.4 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

Sumber: UPT PPPA (2025) diolah peneliti

Jika ditinjau dari jenis kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2025, kekerasan psikis tetap mendominasi dengan 825 kasus (34,1%), diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 747 kasus (30,8%) dan kekerasan fisik sebanyak 698 kasus (28,8%). Selain itu, tercatat 88 kasus eksploitasi (3,6%), 57 kasus penelantaran (2,4%), serta 7 kasus yang masih dalam proses konfirmasi. Meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya, data tersebut menandakan bahwa permasalahan yang terjadi masih tergolong serius dan membutuhkan upaya pencegahan serta penanganan yang lebih maksimal.

Fenomena ini menunjukkan **tingginya** tingkat kerentanan sosial yang dialami perempuan dan anak, kelompok yang sering menjadi target utama tindak kekerasan. Kekerasan sendiri dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti, mengintimidasi, dan mengancam orang lain. Tindakan ini bisa muncul dalam bentuk fisik maupun psikologis seperti pemukulan, pelecehan, pengucilan, atau bentuk perlakuan menyakitkan lainnya yang berdampak buruk pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional korban.

Menurut (Asni, 2020) dijelaskan bahwa tingginya angka kekerasan menjadi indikasi bahwa upaya pencegahan dan penanganan yang ada belum mampu menekan laju kekerasan secara optimal. Instrumen perlindungan yang telah disediakan oleh pemerintah sudah sangat cukup, akan tetapi nampaknya belum sejalan dengan kondisi nyata di lapangan yang masih menunjukkan peningkatan angka pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara kebutuhan perlindungan yang semakin mendesak dengan kemampuan sistem layanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) Kota Administratif Jakarta Timur dengan fokus pada studi Kecamatan Cakung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah kasus yang terjadi sehingga penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penanganan yang telah dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT PPPA Jakarta Timur, studi pada Kecamatan Cakung?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT PPPA Jakarta Timur, studi pada Kecamatan Cakung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik serta kebijakan yang terkait dengan perlindungan kelompok rentan. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai efektivitas layanan publik dalam menanggapi berbagai permasalahan sosial, termasuk kasus-

kasus kekerasan, sehingga memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini terlihat dari kontribusi langsung yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait dalam penerapan layanan di lapangan. Selain menambah pemahaman secara teoritis, penelitian ini diharapkan juga dapat berfungsi sebagai pedoman atau referensi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan dan tindakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

1. Bagi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam memberikan pendampingan, perlindungan, serta layanan psikososial dan hukum yang maksimal bagi korban kekerasan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi UPT PPPA sebagai wadah pengaduan kasus kekerasan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil studi ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas penanganan kekerasan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh UPT PPPA Kota Administratif Jakarta Timur dengan batasan wilayah kasus yang berasal dari Kecamatan Cakung.

1.6 Sistematika Penulisan

Susunan penulisan ini dibuat untuk memberikan panduan yang jelas mengenai alur pembahasan, sehingga memudahkan pembaca dalam mengikuti setiap bagian dari penelitian dengan runtut dan mudah dipahami.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan awal mengenai fokus permasalahan yang menjadi objek penelitian, dimulai dari latar belakang yang menguraikan faktor-faktor utama penyebab munculnya isu serta alasan dilakukannya penelitian. Selanjutnya, bab ini memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan yang menggambarkan susunan bab beserta isi secara keseluruhan, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai alur dan struktur penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan berbagai konsep dan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini. Tujuannya adalah membangun fondasi konseptual yang kuat untuk mendukung analisis. Bab ini juga menjelaskan berbagai hasil studi sebelumnya yang relevan, baik dari segi tema, objek, maupun pendekatannya, sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap topik yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan dan tahapan yang akan diterapkan dalam melaksanakan penelitian. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana proses penelitian dirancang dan dilaksanakan guna menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Pokok-pokok yang dibahas mencakup jenis pendekatan, teknik dalam mengumpulkan data, metode analisis data, serta lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai kegiatan pengumpulan data di lapangan. Peneliti memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian serta kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Data yang dipaparkan berasal dari kombinasi metode, termasuk observasi langsung untuk melihat jalannya aktivitas secara nyata, wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menangkap pengalaman dan pandangan mereka, serta dokumentasi sebagai bukti pendukung temuan. Setelah data terkumpul, pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan tersebut pada teori-teori yang relevan dan indikator efektivitas yang telah dijadikan kerangka analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan bagian penutup berupa kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan dirumuskan dengan merujuk pada hasil analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya, sehingga dapat menjawab secara tepat rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran yang diberikan bersifat aplikatif dan ditujukan bagi pihak-pihak terkait sebagai acuan dalam perbaikan kebijakan, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan program di lapangan.

